Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

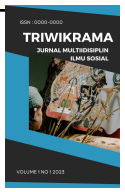

DAMPAK KONFLIK PERBATASAN WILAYAH DOKLAM TERHADAP KEAMANAN EKOLOGIS BHUTAN

Siti Nuna Raisyah
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:
Received
Revised
Accepted
Available online

sitinuna26@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian akan membahas terkait bagaimana konflik kepentingan politik di kawasan perbatasan tiga negara, Bhutan, China dan India memberikan dampak terhadap upaya Bhutan dalam menjaga keamanan ekologis negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan kekuatan politik yang hadir di antara ketiga negara dan ancaman dari kekuatan dominan terhadap aspek penunjang komitmen netralitas karbon dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan penjelasan secara deskriptif. Digunakan konsep ekologi politik yang digunakan dalam melihat konteks kepentingan dan kekuatan politik masing-masing aktor. Hasilnya, konflik perbatasan yang melibatkan Bhutan, China dan India dinilai berdampak pada upaya Bhutan memaksimalisasi kawasan hutan dan mengupayakan pembangunan suaka margasatwa di kawasan Sakteng.

Kata Kunci: ***Keamanan Ekologi*, *Bhutan*, *GNH*, *Perbatasan***

A B S T R A C T

The research will discuss how conflicting political interests in the border region of three countries, Bhutan, China and India, have an impact on Bhutan's efforts to maintain the country's ecological security. This research aims to analyze the political power gap between the three countries and the threat from the dominant power to the supporting aspects of the commitment to carbon neutrality and environmental protection. The research was conducted through a qualitative method with data collection techniques in the form of literature review which was then analyzed to produce descriptive explanations. The concept of political ecology was used to see the context of interests and political power of each actor. As a result, the border conflict involving Bhutan, China and India is considered to have an impact on Bhutan's efforts to maximize forest areas and seek the development of wildlife reserves in the Sakteng area.

Keywords: Ecological Security*, *Bhutan*, *GNH*, *Borders

*Corresponding author
E-mail addresses: sitinuna26@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 Number 4, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENDAHULUAN

Studi Hubungan Internasional yang didasarkan pada narasi terkait keamanan global dan perdamaian dunia, dalam perkembangannya mengalami pergeseran perspektif terkait konsep keamanan sejak serangkaian aspek dalam cakupan lebih luas mulai dipertimbangkan kala memasuki akhir abad ke-20, di antaranya dengan hadirnya keamanan ekologis dan keamanan manusia (*Human Security*) dalam meja perbincangan. Pergeseran perspektif terkait keamanan ditandai dengan kesadaran bahwa kedaulatan negara untuk mencegah agresi militer dari pihak negara lain, tidak lantas memberikan jaminan keamanan terhadap setiap individu di dalam wilayah teritorial negara tersebut untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan memenuhi kebutuhan domestik (Sayyidati, 2017). Hadirnya kesadaran akan ancaman global yang terlepas dari keamanan militer wilayah teritori seperti ancaman kerusakan lingkungan, didasarkan pada meningkatnya potensi ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia melalui peristiwa perubahan iklim, bencana ekologis, kemiskinan struktural, dan beragam bentuk ancaman yang telah terlepas dari ancaman keamanan berbasis serangan militer.

Dalam merespon perspektif keamanan yang semakin meluas, negara turut mengembangkan upaya peningkatan keamanan pada bidang-bidang terkait melalui perumusan kebijakan dalam dan luar negeri serta upaya kolaborasi untuk menjawab tantangan keamanan yang mengancam individu. Salah satu yang menjadi fokus internasional kemudian adalah ancaman keamanan ekologis yang terus menunjukkan peningkatan urgensi seiring dengan perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat yang semakin bervariasi. Dalam hal ini, kerusakan iklim merupakan tanggung jawab kolektif negara-negara yang dalam pemenuhan kebutuhannya tidak terlepas dari emisi bahan bakar, industrialisasi, pembukaan lahan dan agenda maksimalisasi penggunaan sumber daya lainnya. Menyadari keamanan ekologis sebagai fokus bersama, kolaborasi perbaikan iklim dilaksanakan dalam berbagai bentuk, sejak Konferensi Stockholm 1972 yang membuka dialog internasional guna membangun kesadaran bersama pentingnya penanganan perubahan iklim, hingga *Paris Agreement* tahun 2015 di bawah *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang melibatkan 196 negara untuk mencapai tujuan utama pembatasan kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius, peningkatan adaptabilitas negara untuk menghadapi dampak perubahan iklim serta upaya perbaikan iklim yang bertanggung jawab dan transparan melalui pelaporan emisi karbon yang harus menjadi salah satu agenda yang hendak dicapai dalam target nasional.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 4 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Di antara negara-negara yang memberikan komitmen penanganan kerusakan iklim, terdapat negara penghasil emisi gas rumah kaca dominan hingga negara-negara kecil dengan pengembangan industrialisasi relatif minim. China dan India merupakan bagian dari negara-negara raksasa industri yang meratifikasi Perjanjian Paris dan berkomitmen untuk melaksanakan penanganan kerusakan iklim, di antara keduanya terdapat pula negara kecil Bhutan yang turut menyepakati komitmen penanganan iklim. Dalam penerapannya, komitmen penanganan iklim tidak dapat terlepas dari kepentingan politik negara, sehingga resiko ketimpangan kontribusi dan pelanggaran komitmen sangat tinggi pada praktiknya. Fenomena ini kemudian dapat dianalisis melalui konsep ekologi politik yang melihat bagaimana aspek-aspek politik hadir dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup sehingga kerusakan alam dan ancaman keamanan ekologis tidak bersifat netral, melainkan akumulasi kepentingan setiap aktor yang memiliki kepentingan politik dalam pemanfaatan sumber daya alam. (Herdiansyah, 2019). Melalui konsep ekologi politik, perbedaan kekuatan politik negara dapat dilihat sebagai faktor yang memengaruhi keamanan ekologis pada negara-negara di dalam kawasan yang sama. Bhutan, China dan India adalah salah satu contoh negara yang berbatasan di wilayah Asia Selatan dengan perbedaan kekuatan politik serta perkembangan industri yang cukup signifikan. Bhutan dengan komitmen netralitas karbon sejak tahun 2011 berhadapan dengan masifnya industrialisasi China dan India dan konflik perbatasan sejak pembangunan secara sepihak oleh China di tahun 2017 tepatnya di wilayah perbatasan Doklam yang merupakan titik perbatasan ketiga negara. Melalui konsep ekologi politik dan keadilan iklim, ketimpangan kekuatan politik negara pada konflik perbatasan wilayah akan dianalisis untuk melihat dampaknya terhadap keamanan ekologis Bhutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ekologi Politik

Ekologi Politik merupakan sebuah konsep yang menganalisis terkait relasi kekuasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan masyarakat. Konsep ini merupakan paradigma alternatif yang inspirasinya dapat dilihat dari berbagai disiplin ilmu lainnya seperti ekonomi politik dan post-strukturalisme. Ekologi politik kemudian menganalisis kekuatan aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam seperti pemerintah, institusi atau perusahaan dan keuntungan yang diterima (Benjaminsen & Svarstad, 2018). Ekologi-politik dapat didefinisikan sebagai suatu

*Corresponding author
E-mail addresses: sitinuna26@gmail.com

kajian politik untuk memahami keterkaitan antara manusia dengan perubahan kondisi alam yang dihasilkan oleh keputusan-keputusan dalam proses politik (Dharmawan, 2007).

1. METODE

Penelitian akan dilakukan melalui metode kualitatif dengan mengumpulkan data melalui metode *literature review* atau kajian pustaka. Proses identifikasi dampak yang hadir pada keamanan ekologis Bhutan dari hadirnya ketimpangan kekuatan politik dalam konflik perbatasan Doklam akan didasarkan pada pencarian dan analisis data yang didapatkan melalui studi pustaka berbentuk jurnal ilmiah, artikel dari *website online* dan penelitian terdahulu. Dengan hasil data yang telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan analisis untuk kemudian ditarik sebuah penjelasan deskriptif yang menggambarkan dampak yang terjadi pada keamanan ekologis Bhutan.

2. PEMBAHASAN

Bhutan dan Komitmen Penanganan Iklim

Membicarakan penanganan kerusakan iklim yang kian hari kian mengancam, upaya penanganan dengan pelibatan peran negara untuk memastikan tanggung jawabnya atas pengrusakan kolektif menjadi penting. Bhutan, terletak di kaki Gunung Himalaya, merupakan sebuah negara kecil yang berada di Asia Selatan, menghadirkan regulasi yang tegas dalam penanganan perubahan iklim. Bhutan memiliki wilayah perbatasan langsung dengan China dan India, dengan keseluruhan wilayah negara hanya seluas 38.394 km persegi dan tidak memiliki kawasan laut, melainkan dikelilingi pegunungan Himalaya. Bhutan menerapkan *Gross National Happiness* (GNH) sebagai indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan dan perkembangan negara. Konsep ini sebenarnya telah hadir sebagai suatu konsep dalam negara Bhutan sejak abad ke-16, tetapi kemudian diperkenalkan kepada dunia internasional pada tahun 1972 di masa pemerintahan Raja Bhutan IV, Jigme Singye Wangchuck (Tetsuro, 2019). Konsep GNH ini menjadi konsep alternatif yang diamini oleh Bhutan dibanding menggunakan standar internasional *Gross Domestic Product* atau GDP yang dominan indikatornya sangat bernuansa ekonomi. GNH sendiri mengukur kesejahteraan masyarakat melalui indikator non-material seperti sosial masyarakat, kebudayaan dan kelestarian lingkungan, serta nilai kepercayaan Budha yang menjadi agama mayoritas masyarakat dan kerajaan (Kanupriya, 2017). GNH dalam penerapannya, melibatkan empat pilar utama yang saling berkesinambungan satu sama lain, di antaranya ialah keadilan dalam pembangunan sosial ekonomi, melestarikan lingkungan hidup, pelestarian budaya yang

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 4 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

dimiliki, serta pemerintahan yang memperhatikan berbagai aspek tersebut yang kemudian dapat ditakar indikatornya melalui 33 indikator yang ditetapkan untuk mengukur indeks keberhasilan pelaksanaan GNH (Prakoso et al., 2024).

Cerminan dari pelaksanaan GNH Bhutan, dapat dilihat pada penerapan komitmen netralitas karbon sejak tahun 2011 hingga mencapai posisinya sebagai negara yang mampu menyerap emisi karbon yang dihasilkan pada tahun 2017 dengan data yang menunjukkan Bhutan menghasilkan sebanyak 2,2 juta ton emisi karbon yang kemudian diserap kembali oleh hutan sebanyak tiga kali lipat. Luasnya hutan yang dimiliki Bhutan setidaknya berada pada persentase 70% dari total keseluruhan wilayah negara, hal ini berkaitan dengan penetapan pembagian wilayah untuk kawasan tertutup hutan dalam konstitusi Bhutan sejumlah 60% dari keseluruhan wilayah negara (S, 2025). Oleh karena itu, hutan adalah potensi sumber daya alam utama yang menyokong komitmen netralitas karbon Bhutan.

Konflik Perbatasan Wilayah Bhutan-China-India

Bhutan yang letaknya berbatasan langsung dengan dua negara besar yakni China dan India, turut terlibat dalam konflik perbatasan wilayah. Bhutan, China dan India terlibat dalam konflik perbatasan pada wilayah Doklam, yang merupakan dataran tinggi tempat bertemunya perbatasan ketiga negara. Konflik perbatasan wilayah sejatinya telah berlangsung sejak 1984, di mana kedua negara berulang kali mengadakan dialog terkait kesepakatan wilayah perbatasan. Hingga pada tahun 1998, kedua negara bersepakat untuk menjaga perdamaian pada kawasan perbatasan. Akan tetapi, konflik perbatasan kembali terjadi tepatnya pada Juni 2017 dengan dilakukannya pembangunan jalan raya secara sepihak oleh China oleh *People's Liberation Army.* Pembangunan jalan raya ini dilakukan pada wilayah Doka La mengarah ke kamp militer di kawasan Zompelri (Mardiana, 2020) Klaim yang dilakukan oleh China bukannya tanpa alasan, wilayah doklam memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan aksesibilitas China pada kebutuhan militer dan keberlangsungan agenda ekonomi *Belt and Road Initiative* dengan Bangladesh. Pasca klaim sepihak pada tahun 2017, China terus melakukan pembangunan pada kawasan Himalaya, tepatnya berjarak kurang lebih 30 kilometer dari daerah Doklam, di mana kawasan ini merupakan kawasan Bhutan yang tak berpenghuni. (VoA Indonesia, 2022)

Dalam konflik perbatasan wilayah tersebut, India mengambil peran dalam memberikan perlindungan kepada Bhutan dengan didasarkan pada ikatan perjanjian kerjasama di antara

*Corresponding author
E-mail addresses: sitinuna26@gmail.com

kedua negara pada tahun 2007 yang dikenal sebagai *Indian Bhutan Friendship Treaty 2007.* Melalui perjanjian ini, India dapat memberikan perlindungan kepada Bhutan dari bahaya serangan negara lain. Selain bantuan perlindungan dari kekuatan China pada sengketa wilayah Doklam, Bhutan dan India juga menjalin kerjasama dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang diproduksi Bhutan untuk mengatasi ancaman iklim, sedangkan kelebihan pasokan listrik akan disalurkan kepada India yang juga meningkatkan kinerja ekonomi Bhutan (Chen et al., 2007)

Selain pada wilayah Doklam, China juga melakukan klaim sepihak terhadap kawasan *Sakteng Sanctuary* yang berada pada daerah timur Bhutan. Pada Juli 2020 lalu, China menetapkan kawasan Sakteng sebagai wilayah sengketa perbatasan yang oleh Bhutan tidak diakui termasuk dalam 24 wilayah perbatasan yang disengketakan sejak tahun 1998. Klaim yang dilakukan oleh China sendiri menyatakan bahwa wilayah yang sedang dalam persengketaan tersebut tidak boleh menerima pendanaan dari Amerika Serikat sebagai cagar alam yang berada di bawah kawasan Bhutan. (Ethirajan, 2020)

Analisis Dampak Ekologis

Dalam konflik perbatasan wilayah yang melibatkan Bhutan, China dan India, identifikasi kekuatan politik setiap aktor menunjukkan dua kekuatan dominan yang berada dalam konflik berkepanjangan. Bhutan secara geografis terletak di antara kedua kekuatan besar yang terus berada pada ketegangan dan dampak negatif terhadap komitmen Bhutan menjaga keamanan ekologis dalam wilayahnya. Keamanan ekologis dipahami sebagai serangkaian usaha untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan pengelolaan sumber daya alam. Bhutan sendiri mengupayakan keamanan ekologi negaranya dengan upaya netralitas karbon dan perlindungan kawasan hutan. Seperti yang telah dijelaskan, konstitusi Bhutan mengatur kawasan hutan berada pada persentase 60% dari keseluruhan wilayah negara dikarenakan pentingnya peran hutan dalam menyerap emisi karbon dan sebagai potensi wisata berkelanjutan yang ramah lingkungan. Hutan untuk menyerap karbon kemudian akan menjadi penyokong Bhutan dalam upaya netralitas karbon, menjaga kawasan hutan juga merupakan pemenuhan pilar dalam GNH yang menekankan pembangunan berkeadilan dan tetap berperspektif keberlanjutan.

Konflik pada wilayah perbatasan menjadi ancaman terhadap 70% wilayah hutan Bhutan yang menjadi penunjang utama komitmen negara menjaga keamanan ekologi. Klaim wilayah yang dilakukan oleh China, terus meluas berdasarkan data yang telah dipaparkan. Pembangunan yang berlangsung sejak tahun 2017 di kawasan Doklam kemudian meluas hingga 30 kilometer dengan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 4 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

pembangunan pemukiman dilakukan pada kawasan Bhutan yang tidak berpenghuni. Ekspansi yang dilakukan China akan menjadi ancaman bagi penetapan wilayah hutan dalam konstitusi Bhutan, mengingat luas keseluruhan wilayah negara yang hanya berada pada angka 38.394 kilometer persegi.

Selain upaya ekspansi guna memenuhi kebutuhan China akan mobilisasi keperluan militer dan ekonomi, konflik yang terjadi antara China dan India turut menjadi faktor yang memicu Bhutan dilihat sebagai wilayah strategis untuk menunjukkan kekuatan. Dalam klaim sepihak China pada Juni 2020 terhadap wilayah Sakteng yang merupakan cagar budaya, terdapat ancaman keamanan ekologis dalam upaya Bhutan membangun kawasan Suaka Margasatwa dan wisata berkelanjutan yang dapat menyokong GNH Bhutan pada pilar penguatan ekonomi dan penyeimbangannya dengan aspek lingkungan. China tentunya menunjukkan kekuatan politiknya dalam perlombaan pembangunan di kawasan perbatasan dengan India melalui klaim sepihak terhadap Bhutan. Mengingat perbatasan ketiga negara juga merupakan wilayah yang penting bagi India.

Melihat dari segi ekologi politik, ancaman keamanan ekologis yang hadir pada wilayah Bhutan hadir dikarenakan dominasi kekuatan ekonomi China dalam perebutan wilayah dan pembangunan sepihak. Hal ini dapat dilihat melalui pelanggaran perjanjian perdamaian tahun 1998, pembangunan yang terus berlanjut di sekitar kawasan Doklam hingga tahun 2022 dan upaya pembatasan akses bantuan dana demi pembangunan Suaka Margasatwa di kawasan Sakteng.

3. SIMPULAN

Upaya perbaikan kondisi iklim dan pelestarian lingkungan hidup merupakan serangkaian akumulasi berbagai aspek yang saling memengaruhi. Konflik perbatasan wilayah Bhutan, China dan India menjadi salah satu contoh kompleksitas yang hadir dalam upaya mewujudkan keamanan ekologis suatu negara yang tidak dapat dipisahkan dari kehadiran kekuatan politik lain yang secara geografis berada pada satu kawasan. Urgensi isu lingkungan untuk menjadi bahan kajian dalam Hubungan Internasional nampak pada bagaimana Bhutan mampu membuktikan komitmennya dan menjaga netralitas karbon dan pada tidak hadirnya regulasi yang dapat mengatur keadilan kontribusi setiap negara untuk memberikan usaha yang sama. Bhutan sebagai negara yang menjalankan komitmen internasional dalam pelestarian lingkungan pada saat yang bersamaan belum dapat terbebas dari ancaman kedaulatan wilayah teritorial yang berada di bawah ancaman China selaku negara industri dominan. Menggunakan kacamata ekologi politik dalam melihat lingkungan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari kepentingan politik menjadi relevan dalam melihat upaya pencapaian keamanan ekologis Bhutan yang dipengaruhi oleh serangkain kepentingan politik negara dominan pada wilayah tertentu.

*Corresponding author
E-mail addresses: sitinuna26@gmail.com

4. DAFTAR PUSTAKA

Benjaminsen, T. A., & Svarstad, H. (2018). *Encyclopedia of Ecology* (B. D. Fath, Ed.). Elsevier Science.

Chen, E, M., & Jaffe, A. M. (2007). Energy security: Meeting the growing challenge of national oil companies. *Whitehead J. Dipl. & Int'l Rel*, *9*.

Dharmawan, A. (2007). Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik. *Sodality*, *1*(1), 2-37.

Ethirajan, A. (2020, November 25). *Why Bhutan's Sakteng wildlife sanctuary is disputed by China*. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-55004196?utm_source=chatgpt.com

Herdiansyah, H. (2019). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL*, *7*(2), 143-151. https://core.ac.uk/download/pdf/478839865.pdf

Kanupriya, G. (2017). Sustainable development and spirituality: A critical analysis of GNH index. *International Journal of Social Economics*, *44*(12), 1919-1939.

Mardiana, V. (2020). KRISIS DOKLAM DAN KEPENTINGAN NASIONAL INDIA. *Review of International Relations*, *2*(2), 91-102. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rir/article/view/17966/10558

Prakoso, H. A., Anwar, V. A., & Malasari. (2024). Relevansi Ide Poin SDG's dan GNH Dalam Implementasi Pembangunan Sosial-Ekonomi yang Adil Melalui Sektor Pariwisata di Bhutan. *JURNAL PARTISIPATORIS*, *6*(1), 73-92.

S, A. (2025, Maret 5). *Bagaimana Bhutan Jadi Satu-satunya Negara dengan Emisi Karbon Negatif?* National Geographic Indonesia.

https://nationalgeographic.grid.id/read/134224213/bagaimana-bhutan-jadi-satu-satunya-negara-dengan-emisi-karbon-negatif?page=all

Sayyidati, A. (2017). Isu Pemanasan Global dalam Pergeseran Paradigma Keamanan pada Studi Hubungan Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, *6*(1), 39-45. file:///C:/Users/user/Downloads/2300-Article%20Text-10436-3-10-20180925.pdf

Tetsuro, M. (2019). Bhutan: environmental education and gross national happiness (gnh). *Primates*, *60*(2), 103-108.

VoA Indonesia. (2022, 1 18). *Pembangunan China di Himalaya Meluas ke Perbatasan Sengketa dengan Bhutan*. VoA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/pembangunan-china-di-himalaya-meluas-ke-perbatasan-sengketa-dengan-bhutan/6401476.html

*Corresponding author
E-mail addresses: sitinuna26@gmail.com